

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni
BIRO TATA PEMERINTAHAN

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	312.648.500	36,10	36,10	0,00	111.061.000	35,52	96.797.856	30,96	4,56					
1.1	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipatan	312.648.500	36,10	36,10	0,00	111.061.000	35,52	96.797.856	30,96	4,56					
1.1.1	2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipatan	312.648.500	36,10	36,10	0,00	111.061.000	35,52	96.797.856	30,96	4,56		BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/kota di DIY: 1. Terlaksananya rapat koordinasi internal; 2. Tersampainya surat permohonan data wilayah administrasi kepada Kabupaten/Kota berdasarkan surat Asetan Pemerintahan dan Administrasi Umum Nomor 125 / 00181-; 3. Penyusunan data wilayah tahun 2023 4. Telah dicetak buku Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY tahun 2023 5. Buku Kode dan Data Wilayah telah di distribusikan kepada OPD terkait 8. Laporan pembinaan serta pengawasan penetapan dan penegasan batas kalurahan: 1. Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka percepatan penegasan batas kalurahan/keurahan di DIY; 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan BIG dalam rangka percepatan pelaksanaan penegasan dan penetapan batas kalurahan/keurahan; 3. Terlaksananya Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Keurahan di DIY selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 - 28 Februari 2023 dengan Narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dihadiri peserta dari OPD Tim Teknis Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota se DIY dan perwakilan lurah se DIY 4. Tersusunya Surat Gubernur DIY kepada Menteri Dalam Negeri terkait Laporan Penegasan Batas Kalurahan/Keurahan tahun anggaran 2022 5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penegasan Batas Kalurahan di kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo 6. Tersusunya draft Surat Permohonan laporan Pelaksanaan kegiatan di Kab/Kota Semester 1 tahun 2023 C. Laporan Pembahasan Revisi Peremendagri Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah : 1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan sinkronisasi batas daerah Kab. Gunungkidul - Kab. Wonorejo pada subsemen Kal. Songbanyu - Desa Paranggupito. 2. Telah dilaksanakan rapat kerja pembahasan usulan revisi peremendagri batas DIY-Jateng pada segmen batas Kabupaten Sleman -Kab. Kliten dan Kab. Gunungkidul - Kab. Sukoharjo. 3. Telah dilaksanakan rapat kerja pembahasan usulan revisi peremendagri batas Kab. Kulon Progo - Kab. Sleman. 4. Telah dilaksanakan rapat koordinasi melalui zoom meeting batas daerah Kab. Gunungkidul - Kab. Wonorejo pada sub segmen Kal Songbanyu - Desa paranggupito 5. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan tirjauan lapangan batas DIY - Jateng Segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang di Kalurahan Gembosi, Ngarsari dan Pagerharjo 6. Telah dilaksanakan tirjauan lapangan dalam rangka konfirmasi garis batas dan konfirmasi status jalan pada perbatasan Kab. Gunungkidul - kab. Sukoharjo sebagai tindak lanjut raker batas pada bulan Mei 2023 Faktor Penghambat: - efisiensi s.d bulan Juni sebesar Rp 9.807.144 yaitu pada perjanjian biasa sebesar Rp. 1.671.321, belanja bahan komputer Rp. 189.200, ATK 180.934, kertas cover Rp. 117.040, cetak 82.300, honor narsum Rp. 2.000.000, perjanjian paket meeting 6.366.340 - Pembahasan Draft revisi peremendagri dan penandatangan Berita Acara Kesepakatan batas daerah DIY-Jateng dengan Tim Penegasan Batas Daerah Pusat masih menunggu jadwal dari Kemendagri, sehingga anggaran perjalanan dinas dalam rangka pembahasan tersebut belum terasap. Faktor Pendukung: - Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD Tim Penegasan Batas Daerah/Kalurahan di DIY. - Koordinasi dan sinergi dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayah berjalan baik dan lancar.</p>
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.334.000	94,46	94,46	0,00	207.968.800	94,39	205.278.300	93,17	1,22					
2.1	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	24.464.000	62,29	62,29	0,00	15.216.600	62,20	15.216.600	62,20	0,00					
2.1.1	2.12.02.1.01.02	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.464.000	62,29	62,29	0,00	15.216.600	62,20	15.216.600	62,20	0,00		DIY			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunya jadwal kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan raker pendataan penduduk non permanen; 3. Terlaksananya rapat kerja pendataan penduduk non permanen pada tanggal 24 Februari 2023; 4. Terlaksananya rapat kerja pendataan penduduk rentan adminduk pada tanggal 15 Maret 2023; 5. Koordinasi evaluasi pelaksanaan rapat kerja penduduk rentan dan penduduk non permanen pada bulan April 2023; 6. Terlaksananya koordinasi persiapan rapat kerja penduduk rentan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni; 7. Terlaksananya rapat kerja penduduk rentan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023 dengan memunculkan beberapa LKSA di wilayah DIY dan Dinas Dukcapil Kab/Kota se-DIY; Faktor Penghambat: - Kurangnya kesediaan, ketidaktahuan dan belum pahami masyarakat terkait pengurusan dokumen administrasi kependudukan. - Topografi wilayah Gunungkidul membuat instansi yang berkaitan dengan adminduk jaraknya cukup jauh sehingga masyarakat menunda untuk melaporkan peristiwa kependudukannya. - Telah dilakukan jemput bola pelayanan adminduk namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa kependudukannya. Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY - terdapat layanan jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota sehingga dapat mempermudah layanan adminduk kepada panti dan LKSA</p>
2.2	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	195.870.000	98,48	98,48	0,00	192.752.200	98,41	190.061.700	97,03	1,38					
2.2.1	2.12.02.1.02.01	Facilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	19.220.000	97,40	97,40	0,00	18.702.200	97,31	18.131.800	94,34	2,97		Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pendaftaran Penduduk : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rapat Kerja Facilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunya jadwal kegiatan fasilitasi terkait pendaftaran penduduk tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi terkait fasilitasi pendaftaran penduduk pada bulan Januari 2023; 3. Terlaksananya rapat kerja pendaftaran warga negara asing di wilayah NKRI secara daring dengan peserta dan perusahaan/ponsor yang memiliki pegawai WNA dan narasumber dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2023; 4. Terlaksananya kegiatan coffee morning terkait pendaftaran WNA di DIY bersama dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota se DIY dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada 14 Maret 2023; 5. Tercekatnya leaflet terkait Kartu Identitas Anak dan Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing di Wilayah NKRI pada bulan April 2023; 6. Terselenggaranya Rapat Kerja Pendaftaran Penduduk pada tanggal 23 Mei 2023 dengan peserta dari mahasiswa/ UGM, UNY, UIN, UPI dan UII; 7. Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan rapat kerja pendaftaran penduduk pada bulan Juni 2023; Faktor Penghambat: - efisiensi uang transportasi peserta raker warga negara asing pada bulan Februari 2023 sebanyak Rp 480.000 - efisiensi belanja alat tulis kantor bulan April 2023 sebanyak Rp 25.200 - efisiensi belanja kertas cover bulan April 2023 sebanyak Rp 5.200 - efisiensi uang transportasi peserta raker fasilitasi pendaftaran penduduk pada bulan Mei 2023 sebanyak Rp 60.000 Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Keperdukunan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
2.2.2	2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Tertarik Pendaftaran Penduduk	176.650.000	98,60	98,60	0,00	174.050.000	98,53	171.929.900	97,33	1,20	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Keperdukunan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan : 0 Laporan dari 1 Laporan		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan sosialisasi terkait administrasi keperdukunan tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi penyesuaian sosialisasi pada bulan Februari 2023 dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota, Kaparewon/Kemantren, Kalurahan/Kelurahan yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi; 3. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Permendagri 73 Tahun 2022 pada tanggal 14 Februari 2023 dengan peserta dari TP PKK di beberapa Kaparewon dan Perwakilan IBI di DIY; 4. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 16 Februari 2023 di Kalurahan Gwangsan; 5. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 17 Februari 2023 di Kalurahan Suryatmajan; 6. Terpukuliasasinya kegiatan Sosialisasi Permendagri 73 Tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2023 melalui surat kabar Tribun Jogja; 7. Terpukuliasasinya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA yang dilakukan di Kalurahan Givengan dan Suryatmajan pada tanggal 20 Februari 2023 melalui surat kabar Tribun Jogja; 8. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 2 Maret 2023 di Kaparewon Sembilo; 9. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 3 Maret 2023 di Kalurahan Calutunggal, Kaparewon Depok, Sleman; 10. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 9 Maret 2023 di Kalurahan Bendungan, Kaparewon Wates, Kulon Progo; 11. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 16 Maret 2023 di Kalurahan Tridadi, Kaparewon Sleman, Sleman; 12. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 17 Maret 2023 di Kaparewon Gamping, Sleman; 13. Terlaksananya koordinasi penyiapan sosialisasi pada bulan April 2023 dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota, Kaparewon/Kemantren, Kalurahan/Kelurahan yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi; 14. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 11 Mei 2023 di Kalurahan Pengasih, Kulon Progo; 15. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 19 Mei 2023 di Kalurahan Sinduadi, Sleman; 16. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 25 Mei 2023 di Kaparewon Sewon, Bantul; 17. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 26 Mei 2023 di Kaparewon Berbah, Sleman; 18. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 8 Juni 2023 di Kalurahan Patuk, Kaparewon Patuk, Gunungkidul; 19. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 9 Juni 2023 di Kaparewon Wonosari, Gunungkidul; 20. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 15 Juni 2023 di Kalurahan Logandeng, Kaparewon Playen, Gunungkidul; 21. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Keperdukunan dan KIA pada tanggal 22 Juni 2023 di Kaparewon Paliyan, Gunungkidul; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebesar Rp 85.200 - efisiensi belanja kertas dan cover sebesar Rp 14.700 - efisiensi belanja baterai sebesar Rp 20.200 - efisiensi honor narasumber karena ketidakhadiran DPRD sebagai narasumber pada kegiatan Sosialisasi Adminduk di Kalurahan Bendungan, Wates, Kulon Progo 9 Maret 2023 sebesar Rp 1.000.000,- - efisiensi honor narasumber karena ketidakhadiran DPRD DIY sebagai narasumber kegiatan Sosialisasi Adminduk di Kaparewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul 9 Juni 2023 sebesar Rp 1.000.000,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Keperdukunan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	72.142.900	47,15	47,15	0,00	33.683.100	46,69	33.344.700	46,22	0,47					
3.1	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	41.622.200	69,80	69,80	0,00	28.891.300	69,41	28.593.000	68,70	0,71					
3.1.1	2.12.03.1.01.04	Facilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	41.622.200	69,80	69,80	0,00	28.891.300	69,41	28.593.000	68,70	0,71	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Keperdukunan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Terpadu Fasilitas Dokumentasi Administrasi Keperdukunan : 0 Laporan dari 1 Laporan		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di Kab/Kota tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait kegiatan fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil tahun 2023; 3. Terlaksananya pengadaan peralatan penunjang pelayanan terpadu (cleaning kit, film, ribbon) pada bulan Maret 2023; 4. Terlaksananya penyusunan konsep pelayanan terpadu yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2023; 5. Terlaksananya koordinasi internal terkait pelaksanaan pelayanan terpadu; 6. Terlaksananya koordinasi terkait lokasi kabupaten yang akan menjadi lokasi pelayanan terpadu dengan memperhatikan jumlah wilayah KTP-el yang belum dilakukan pemetaan biometrik; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahalannya masyarakat terkait keperguruan dokumen administrasi keperdukunan. - Tahid dilakukan jemput bola pelayanan adminduk namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa keperdukunannya. - efisiensi belanja pengadaan alat penunjang pelayanan terpadu (cleaning kit, film, ribbon) sebesar Rp 298.300 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Biro Iptek dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el di sekolah dan pendafaran identitas Keperdukunan Digital
3.2	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	30.520.700	16,27	16,27	0,00	4.791.800	15,70	4.751.700	15,57	0,13					
3.2.1	2.12.03.1.02.01	Facilitasi terkait Pencatatan Sipil	26.104.500	6,50	6,50	0,00	1.573.600	6,03	1.533.500	5,87	0,16	DIY	Bagian Bina Administrasi Keperdukunan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pelayanan Fasilitas Ibat Nikah : 0 Laporan dari 1 Laporan		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitasi terkait pencatatan sipil tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan fasilitasi terkait pencatatan sipil tahun 2023; 3. Terdistribusikannya surat terkait permohonan penitatan potensi ibat nikah di Kabupaten/Kota pada bulan Maret 2023; 4. Pendataan potensi ibat nikah di Kabupaten/Kota di DIY pada bulan April 2023; 5. Monitoring pendataan potensi ibat nikah di Kabupaten/Kota di DIY pada bulan Mei 2023; 6. Koordinasi terkait tindak lanjut surat permohonan data potensi ibat nikah Kabupaten/Kota dengan basis maksimal penyampaian data pada akhir bulan Juni <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahalannya masyarakat terkait keperguruan dokumen administrasi keperdukunan. - Topografi wilayah Gunungkidul membuat instansi yang berkontak dengan adminduk jarang-jarak jauh sehingga masyarakat menunda untuk melaporkan peristiwa keperdukunannya. - Tahid dilakukan jemput bola pelayanan adminduk namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa keperdukunannya. - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebesar Rp 40.100 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota
3.2.2	2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	4.416.200	74,00	74,00	0,00	3.218.200	72,87	3.218.200	72,87	0,00	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Keperdukunan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemberian Insentif Bagi Anak Pemilik KIA di Wilayah DIY : 0 Dokumen dari 3 Dokumen		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan non pemerintah kewenangan provinsi terkait pencatatan sipil tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan kerja sama pemberian insentif bagi pemegang KIA tahun 2023; 3. Terlaksananya kegiatan rapat kerja sama pemanfaatan kartu identitas anak di DIY pada tanggal 21 Maret 2023; 4. Tersusunnya dokumen perpanjangan perjanjian kerja sama pemberian insentif KIA di DIY antara Pemda DIY dengan Museum Ullen Sentaku, Rodalink Modern Bicycle Outlet Yogyakarta, Toko Buku Diskon 'ogamas Affandi Yogyakarta, Kay's Studio Yogyakarta, Gramedia Sudirman Jogja, Puri Mataram Resto Cafe & Waihana Wisata, Garuda Department Store & Supermarket, PT Produk Rekreasi (Kids Fun) pada bulan April 2023; 6. Terlaksananya perpanjangan perjanjian kerja sama pemberian insentif KIA di DIY antara Pemda DIY

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Devisi	Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)								
																	dengan Museum Lilin Sentulu, Rodalink Modern Bicycle Outlet Yogyakarta, Toko Buku Diskon Togamas Affandi Yogyakarta, Kay's Studio Yogyakarta, Gramedia Sudirman Jogja, Puri Hartono Risto Cafe & Wahana Wisata, Gardena Department Store & Supermarket, PT Produk Rakmasi (Kids Fun); 7. Terlaksananya penandatanganan perjanjian kerja sama pemberian insentif bagi pemilik KIA di DIY pada tanggal 23 Juni 2022 antara Pemda DIY dengan Obelix Group Yogyakarta, Purno Carika Music Studio Yogyakarta, Beringin Optik Yogyakarta, Rhythm Star Music School Yogyakarta, Hugo Violin School Yogyakarta, Haji Chicken & Ayam Geprek Sari Yogyakarta; Faktor Penghambat: - tidak ada hambatan berarti yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Faktor Pendukung: - Koordinasi yang baik antara mitra kerja sama / stakeholder yang memberikan insentif bagi pemegang KIA di DIY	
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	67.573.800	60,10	60,10	0,00	40.193.100	59,48	38.415.742	56,85	2,63							
4.1	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	67.573.800	60,10	60,10	0,00	40.193.100	59,48	38.415.742	56,85	2,63							
4.1.1	2.12.04.1.02.01	Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.331.100	82,00	82,00	0,00	26.165.500	80,93	25.388.142	78,53	2,40			Daerah Istimewa Yogyakarta			1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Unsur Administrasi Kependudukan : Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Operasional SIAK : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitasi terkait pengalihan informasi administrasi kependudukan tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan fasilitasi terkait FIAK tahun 2023; 3. Telah tersedianya data konsolidasi bersih (DKB) semester II tahun 2022 pada bulan Maret 2023; 4. Terlaksananya perawatan operasional SIAK pada bulan April 2023 dalam rangka mendukung Dukcapil Goes to Campus UGM "Layanan Identitas Kependudukan Digital"; 5. Terlaksananya pengembangan sistem informasi untuk mendukung seleksi PPDB DIY tahun 2023 pada bulan Mei 2023; 6. Tersedianya data kependudukan untuk mendukung PPDB SMA/IK DIY 2023 dan terselaksananya aduan terkait data kependudukan calon siswa SMA/IK melalui sistem informasi sinkronisasi data PPDB DIY pada bulan Juni 2023; Faktor Penghambat: - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebanyak Rp 139.100 - efisiensi belanja kertas dan cover Rp 6.000 - efisiensi belanja internet bulan Januari Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Februari Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Maret Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan April Rp 52.043 - efisiensi belanja pemeliharaan operasional SIAK pada bulan April Rp 20.000 - pengembangan sistem informasi untuk mendukung seleksi PPDB DIY 2023 terkait adminiduk dilaksanakan pada bulan Mei 2023 menyesuaikan kesapan pelaksanaan PPDB di Dinas Dikpora DIY - efisiensi belanja internet bulan Mei Rp 52.043 - efisiensi belanja pengembangan sistem informasi untuk mendukung seleksi PPDB DIY tahun 2023 bulan Mei 2023 sebesar Rp 300.000 - efisiensi belanja internet bulan Juni Rp 52.043 Faktor Pendukung: - koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY - Koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dalam proses seleksi PPDB DIY 2023
4.1.2	2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35.242.700	40,00	40,00	0,00	14.027.600	39,80	13.027.600	36,97	2,83			Daerah Istimewa Yogyakarta			1. Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan : Dokumen dari 4 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan : Dokumen dari 2 Dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Rapat Kerja Terkait Pemili : Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya jadwal kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tahun 2023; 3. Penyiapan data kependudukan dari Dinas Sosial DIY terkait verifikasi data penerima bantuan sosial khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY; 4. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan rapat kerja terkait sinkronisasi data pemili 2024 pada bulan April 2023; 5. Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Konsolidasi Data Penduduk untuk Pemili dan Pilkada dengan peserta dari kabupaten/kota UGM pada bulan Mei 2023; 6. Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja "Dukungan Pemerintah Daerah untuk Data Pemili-Pilkada Serentak 2024 yang Berkeadilan" pada tanggal 26 Juni 2023; 7. Terfasilitasinya permohonan data BPS DIY terkait NIK ASN Pemda DIY untuk mendukung finalisasi data Respons pada bulan Juni 2023; Faktor Penghambat: - belum ada anggaran kas keuangan pada triwulan I karena penganggaran dimulai pada bulan April 2023 namun persiapan dan kegiatan telah dilakukan tanpa dukungan anggaran. - Terbatasnya akses database kependudukan akibat penerapan SIAK terpusat, saat ini database kependudukan dikelola sepenuhnya oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri - Efisiensi honor narasumber rapat kerja data pemilipilkada 2024 karena ketidakhadiran narasumber (DPRD DIY) pada bulan Juni 2023 Faktor Pendukung: - Instansi OPD dapat melakukan pemanfaatan data kependudukan melalui Dinas Dukcapil
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	41.126.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00							
5.1	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	41.126.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00							
5.1.1	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	41.126.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta			1. Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Profil Data dan Proyeksi Kependudukan DIY Tahun 2022 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya jadwal kegiatan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan pada tahun 2022; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan penyusunan profil data kependudukan tahun 2022; 3. Terdistribusikannya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri pada bulan Februari - Maret 2022; 4. Terdistribusikannya surat permohonan data pendukung penyusunan profil kependudukan tahun 2022 di berbagai kesetiaan dan pendirian kepada Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Dikpora DIY; 5. Terlaksananya proses pengumpulan data kependudukan semester II 2022 dan data dukung lainnya dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan; 6. Tersusunnya data pendukung penyusunan profil kependudukan tahun 2022 diantaranya kompilasi data konsolidasi bersih dan data dari Dinas Dikpora DIY; Faktor Penghambat: - kegiatan disiapkan pada semester I / tw 1 dan tw 2 dapat dilaksanakan tanpa dukungan anggaran, anggaran kegiatan dianggarkan mulai bulan Juli 2023 untuk pengadaan jasa konsultasi penyusunan profil Faktor Pendukung: - Adanya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2022
6	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	50.000.000	38,55	38,55	0,00	18.457.800	36,92	17.839.200	35,68	1,24							
6.1	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50.000.000	38,55	38,55	0,00	18.457.800	36,92	17.839.200	35,68	1,24							
6.1.1	2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	15.306.800	15,00	15,00	0,00	2.228.400	14,56	2.222.400	14,52	0,04			BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren			1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa - Koordinasi dalam upaya pembinaan dalam manajemen pemerintahan desa dalam upaya penyelesaian permasalahan DUKH pada tanggal 2 Februari. - Koordinasi dalam konteks desa / kalurahan di DIY sehubungan adanya kebijakan penataan desa dalam arah kebijakan reformasi birokrasi Faktor Penghambat: - Tidak ada faktor penghambat yang berarti Faktor Pendukung: - Kesediaan Hiyarantaka selaku Paguyuban Lurah dan Ramong Provinsi untuk hadir memberikan arahan - Kesediaan peserta khususnya dari Kemendagri dan Dinas PPK 4 Kabupaten untuk hadir memberikan arahan dan masukan dalam rapat koordinasi
6.1.2	2.13.04.1.01.04	Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan	18.088.400	10,70	10,70	0,00	1.196.800	6,62	1.189.500	6,58	0,04			BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina			1. Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
		Pengawasan Pembangunan Desa												Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	Pembangunan Desa : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa : Dokumen dari 1 Dokumen	- Fasilitas pembinaan dengan Kalurahan Selomartani, selaku penerima BKK papan penanda kestimewaan dalam penguatan persiapan penyelesaian dokumen pelaksanaan pembangunan papan penanda kestimewaan - Fasilitas Koordinasi dengan Perwakilan Lurah Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Gunungkidul terkait upaya optimalisasi potensi desa melalui rancangan rencana pelaksanaan yang dituangkan dalam dokumen RKP/Kal. - Fasilitas Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa dalam Penyusunan Petunjuk Teknis Pedoman Reformasi Birokrasi Kalurahan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: - Kesiapan paguyuban nayantaka untuk hadir memberikan masukan terhadap proses perencanaan pembangunan desa dalam rancangan pedoman reformasi birokrasi
6.1.3	2.13.04.1.01.05	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	16.604.800	90,60	90,60	0,00	15.032.600	90,53	14.427.300	86,89	3,64			BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	1. Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - "Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa" - Koordinasi pembinaan pengelolaan keuangan desa terhadap Kalurahan Selomartani dalam persiapan pengelolaan pertanggungjawaban APBD BKK Penanda Kestimewaan - Rapat Koordinasi Fasilitas Keuangan Desa dengan Dinas PPKal Kabupaten - Rapat Kerja Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan sasaran 15 perwakilan lurah dari 4 Kabupaten serta 10 PInewu pada tanggal 26 Mei 2023 - Rapat Koordinasi Fasilitas Keuangan Desa terkait penanganan aplikasi Sikodus Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: - Kehadiran Lurah / Pamong serta panewu dalam pelaksanaan kegiatan - komitmen dan penyediaan bahan paparan narasumber yang komprehensif
7	2.22.08	PROGRAM PENYELANGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	385.850.700	3,95	3,95	0,00	15.252.600	3,95	15.236.400	3,95	0,00					
7.1	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	133.725.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00					
7.1.1	2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjangan	133.725.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	DIY		1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjangan : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Naskah Akademik Penetapan Hari Jadi DIY : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Draft Raperda tentang Penetapan Hari Jadi DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
7.2	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Kelestimewaan Urusan Kebudayaan	252.125.700	6,05	6,05	0,00	15.252.600	6,05	15.236.400	6,04	0,01					
7.2.1	2.22.08.5.06.03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Kestimewaan	252.125.700	6,05	6,05	0,00	15.252.600	6,05	15.236.400	6,04	0,01			BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	1. Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Kestimewaan : 1 Unit dari 303 Unit 2. Jumlah Papan Nama Kestimewaan : 1 Kalurahan dari 1 Kalurahan 3. Kajian Standar Penanda Wilayah Kestimewaan : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Pemasangan Quick Response System (QRS) Code : Kalurahan dari 302 Kalurahan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1) Papan Penanda Kestimewaan - Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalsasan, Kabupaten Sleman pada hari Senin, 16 Januari 2023 dengan hasil Kalurahan Selomartani perlu menjalankan beberapa hal berikut: a. Pengusulan proposal kegiatan pembangunan Papan Penanda Kestimewaan oleh Kalurahan Selomartani; b. Proses pengadaan barang dan pembangunan; c. Pelaporan hasil pembangunan Papan Penanda Kestimewaan. - Rapat Koordinasi terkait Penanda Kestimewaan pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Paguyuban Semar Sembogo sejumlah 45 orang dengan pembahasan tindak lanjut penerapan kelembagaan kalurahan atas ketersediaan sarana prasarana di tingkat Padukuhan sebagai entitas terdekat dengan masyarakat. - Koordinasi pelaksanaan pembangunan papan penanda kestimewaan dilakukan untuk memonitor pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, yaitu dengan sasaran 301 kalurahan dengan hasil: a. Laporan pertanggungjawaban dengan koordinasi bersama TAPD (Panitadya dan BPKA) dan Pemerintah Kalurahan, sampai dengan 13 Februari hasil rekabudais terdapat perbedaan dengan catatan sebagai berikut: Biro Tapem ada 43 laporan belum masuk, BPKA ada 11, Panitadya ada 16, sehingga selisih data ada 27 kalurahan yang kemudian dikordinasikan dengan komunikasi secara langsung dengan Kalurahan terkait. b. Koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan Balai Padukuhan dihari 23 Kalurahan dari Gunungkidul pada tanggal 2 dan 6 Maret 2023 terkait koordinasi pembahasan teknis pelaksanaan pembangunan Balai padukuhan. c. Koordinasi terkait persiapan pencairan rehabilitasi balai padukuhan di Kabupaten Gunungkidul dan penerapan nilai kestimewaan pada bangunan Balai padukuhan pada tanggal 30 Maret 2023 dan 11 April 2023. d. Koordinasi terkait persiapan pencairan pemasangan QR Code Tahun 2023 pada tanggal 5 April 2023 - Koordinasi untuk memfasilitasi tindak lanjut hasil kajian pembangunan kantor kalurahan dan Balai padukuhan pada Rabu, 10 Mei 2023 untuk membahas progres usulan rehab Balai padukuhan dengan leading sector Dinas PUP-ESDM DIY dan dicanakikan akan dialihkan ke Kabupaten, dengan hasil: status tanah yang diusulkan untuk direhab agar dicermati. - Koordinasi dan pemantauan progres pembangunan papan penanda kestimewaan pada Kalurahan Selomartani pada tanggal 7 Juni 2023 dengan hasil bahwa pembangunan sudah 100%, sementara laporan pertanggungjawaban masih dalam proses. Diarahkan kepada Kalurahan Selomartani untuk segera menyusun dengan format tertentu kepada Gubernur melalui Panitadya Kestimewaan dengan tembusan BPKA DIY dan Biro Tapem serta kelengkapan laporan disertai dokumentasi. Faktor Penghambat: danya redaksi Kajian Gapur Pemerintah Kalurahan, sehingga kegiatan menunggu penetapan perubahan Dais Tahap 1 Faktor Pendukung: - Kesiapan Pemerintah Kalurahan Selomartani untuk menjalankan kegiatan Pembangunan Papan Penanda Kestimewaan
8	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	608.366.100	50,94	50,94	0,00	297.974.100	48,98	285.881.812	46,99	1,99					
8.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.719.900	69,38	69,38	0,00	14.781.600	68,06	14.212.700	65,44	2,62					
8.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.247.200	66,25	66,25	0,00	7.210.800	64,11	6.990.600	62,15	1,96			BIRO TATA PEMERINTAHAN Setda DIY	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha 2. Rencana Strategis Biro Tapem Tahun 2022-2027 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Rencana Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Rencana Kinerja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Tersusunnya ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Tersusunnya Perjanjian Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan Renstra 2022-2027 2. Penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2022-2027 sesuai dengan PMND 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II 4. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Eselon II 5. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan Renja 2024 6. Penyusunan Dokumen Renja 2024 sesuai dengan Renstra 7. Revisi Dokumen Renstra 2022-2027 8. Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024 9. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV 10. Pembuatan Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan untuk Tahun 2024 (RKA) 11. Pencermatan RKA 2024 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY 12. Revisi RKA 2024 13. Penyelesaian entry renja dan renstra di SIPD 14. Penyelesaian ranhir renstra 2022-2027 15. Penyelesaian ranhir renja 2024 16. Entry pada pasca reforesing 2024 di SIPD 17. Cetak Rancangan Akhir Renstra Tahun 2022-2027 Faktor Penghambat: 1. Efisiensi honor narasumber Forum Perangkat Daerah dikarenakan PNS tidak bisa diberi honorarium, hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Tidak ada hambatan yang berarti lainnya. 3. Entry rincian belanja pada Aplikasi SIPD yang baru perlu dipelajari secara mandiri Faktor Pendukung: 1. Koordinasi internal yang solid 2. Tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																pekerjaan tepat waktu 3. Keaktifan pegawai berkoordinasi dengan TAPD
8.1.2	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.472.700	72,75	72,75	0,00	7.570.800	72,29	7.222.100	68,96	3,33			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 2 Laporan 2. Dokumen LKJP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan monev bulanan/tahunan (LKJP) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	pekerjaan tepat waktu 1. Persiapan pembuatan konsep/bahan LKJP 2. Pengumpulan data terakot dokumen LKJP 3. Penyusunan LKJP 4. Penyusunan LKJP 5. Pencetakan LKJP 6. Penyerahan LKJP ke Biro Organisasi 7. Desk timbal balik triwulan 1 oleh TAPD 8. Tindak lanjut catatan atas desk timbal balik 9. Balokdi TW 1 10. Desk ini mal realisasi keuangan dan fisik pada Biro Faktor Penghambat: Perubahan kegiatan di Mbizmarket mengakibatkan penyesuaian anggaran 2. Terdapat tolok ukur kinerja yang mengalami perubahan sehingga mempengaruhi aktivitas sehingga mengurangi penyelesaian anggaran Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etnos kerja yang baik dan seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu.
8.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.724.600	59,40	59,40	0,00	24.694.600	56,48	24.563.800	56,18	0,30					
8.2.1	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.560.000	53,25	53,25	0,00	15.780.000	50,00	15.780.000	50,00	0,00			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengumpulan bahan 2. Pengecekan validitas berkas pertanggungjawaban keuangan seluruh program sampai dengan Bulan Maret 3. Pembayaran honorarium tim penatausahaan keuangan triwulan 1 tahun 2023 4. Penyusunan laporan keuangan dan sudah verifikasi sampai dengan bulan Juni Faktor Penghambat: Pengumpulan dokumen mendekati akhir bulan tutup buku Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etnos kerja yang baik dan seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu.
8.2.2	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.644.400	95,00	95,00	0,00	4.344.400	93,54	4.260.800	91,74	1,80			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Keuangan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi pegawai akuntansi dengan pengelola BMD biro, serta bendahara SKPD 2. Terselenggaranya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 versi Unaudited 3. Pencetakan Laporan Keuangan Tahun 2022 Faktor Penghambat: Menu pada aplikasi SIPD belum lengkap, sehingga perlu ada pembuatan dokumen pendamping secara manual Faktor Pendukung: Dedikasi pegawai untuk menyelesaikan tugas tepat waktu
8.2.3	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.520.200	63,20	63,20	0,00	4.570.200	60,77	4.523.000	60,14	0,63			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD : 4 Laporan dari 4 Laporan 2. Laporan Keuangan Bulanan : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Keuangan Triwulanan : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Keuangan Semester : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Laporan Prognosis : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penatausahaan keuangan Bulan sampai dengan Bulan Juni Faktor Penghambat: 1. Efisiensi harga alat tulis kantor di bawah standar BMD 2. Perubahan kebijakan di Mbizmarket mempengaruhi pembuatan laporan keuangan Faktor Pendukung: Dedikasi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
8.3	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	51,00	51,00	0,00	5.700.000	50,00	5.700.000	50,00	0,00					
8.3.1	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	51,00	51,00	0,00	5.700.000	50,00	5.700.000	50,00	0,00			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Aset SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Inventarisasi ulang kondisi BMD 2. Pembuatan kartu pemegang BMD 3. Pembayaran honorarium pengurus barang milik daerah sampai dengan triwulan 1 4. Pengisian barang untuk dihapus 5. Konversi kendaraan dinas roda dua berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik roda dua 6. Pembayaran honorarium pengurus barang milik daerah sampai dengan triwulan 2 Faktor Penghambat: Banyak kondisi barang yang sudah mulai rusak (seperti komputer, laptop, printer, dll) tetapi tidak diizinkan untuk penggantian Faktor Pendukung: Dedikasi pegawai untuk tetap menjalankan tugasnya secara efektif dan menyelesaikan tepat waktu
8.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.171.900	48,44	48,44	0,00	173.764.700	47,85	165.325.712	45,52	2,33					
8.4.1	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.531.600	62,00	62,00	0,00	10.807.600	61,65	10.032.967	57,23	4,42			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket 2. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyediaan peralatan listrik demi memperlancar kinerja 2. Pengaktifan kembali akun zoom biro untuk mendukung kelancaran kegiatan Faktor Penghambat: 1. Lampu sering mati, perlu pembaruan jaringan listrik keseluruhan gedung Unit 2 2. Efisiensi harga satuan akun zoom di bawah DPA Faktor Pendukung: Kesiap-siagaan pegawai untuk menghadapi permasalahan dan mengambil solusi
8.4.2	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.203.400	49,50	49,50	0,00	14.956.400	46,44	14.611.700	45,37	1,07			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket 2. Alat Tulis Kantor : 1 Paket dari 1 Paket 3. Subbagian Pemasangan Kebakaran : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan SKPD 2. Mengkomodir peralatan dan perlengkapan kantor Bulan Juni untuk mendukung kelancaran kegiatan 3. Pembelian toner untuk cartridge printer demi kelancaran kegiatan biro Faktor Penghambat: Belum ada pembelian toner di Mbizmarket sehingga pembelian dilakukan secara manual (offline) Faktor Pendukung: 1. Kecepatan rekanan untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan 2. Tanggungjawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Kecepatan rekanan dalam merespon kebutuhan biro 2. Dedikasi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
8.4.3	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.984.900	59,50	59,50	0,00	4.096.700	58,65	4.080.600	58,42	0,23			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket 2. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan bahan pembersih SKPD 2. Mengkomodir peralatan rumah tangga Bulan Juni Faktor Penghambat: Belum ada pembelian toner di Mbizmarket.co.id Faktor Pendukung: 1. Kecepatan rekanan untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan 2. Tanggungjawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
8.4.4	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.489.000	54,50	54,50	0,00	11.394.000	53,02	11.393.900	53,02	0,00			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket 2. Barang cetakan : 1 Paket dari 1 Paket 3. Penggandaan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan SKPD 2. Mengkomodir barang cetakan dan penggandaan Bulan Juni Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Kecepatan rekanan untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan 2. Tanggung jawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Koordinasi dan kerjasama antar pegawai yang terjalin baik
8.4.5	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.160.000	51,00	51,00	0,00	5.580.000	50,00	5.580.000	50,00	0,00			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Bahan bacaan Jawa Post : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Bahan bacaan Kedutaan Rakyat : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan bahan bacaan pada SKPD 2. Menyediakan bahan bacaan surat kabar harian untuk memberikan informasi yang cukup dalam rangka mendukung kinerja SKPD pada Bulan Mei Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerja sama antarpengawai yang solid 2. Kecepatan penyedia dalam merespon kebutuhan Biro
8.4.6	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.803.000	57,00	57,00	0,00	126.930.000	56,72	119.626.545	53,45	3,27			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan konsultasi dan koordinasi : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah sampai dengan Bulan Juni Faktor Penghambat: Efisiensi perjalanan dinas, harga di bawah DPA Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etnos kerja yang baik dan seluruh pegawai untuk

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Pemenerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																mendukung terselesainya laporan tepat waktu. 4. Pegawai menyelesaikan laporan tepat waktu
8.4.7	4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00					Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Pemeliharaan Website Tahun 2023 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY : Website dan 1 Website	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
8.5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.985.000	51,00	51,00	0,00	1.000.000	12,52		1.000.000	12,52	0,00				
8.5.1	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.985.000	51,00	51,00	0,00	1.000.000	12,52		1.000.000	12,52	0,00		Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapawewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan penyediaan jasa surat menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan materi pada SKPD 2. Mengkomodir kebutuhan materi untuk memenuhi kebutuhan SKPD pada bulan Juni Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Kesadaran pegawai untuk memanfaatkan materi sesuai dengan peruntukannya
8.6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.364.700	51,77	51,77	0,00	78.033.200	48,66		75.079.600	46,82	1,84				
8.6.1	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.744.300	50,00	50,00	0,00	8.550.000	48,18		8.351.000	47,06	1,12		Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapawewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibeli/dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit 2. Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan 2. Mengkomodir bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas jabatan pada Bulan Juni 3. Pemeliharaan service kendaraan dinas jabatan 4. Mengkomodir kebutuhan suku cadang kendaraan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerjasama antarpegawai yang solid 2. Antisipasi pegawai untuk merawat kendaraan
8.6.2	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.538.100	49,00	49,00	0,00	51.436.800	48,74		48.686.000	46,13	2,61		Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapawewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorannya : 8 Unit dari 11 Unit 2. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 : 4 Unit dari 4 Unit 3. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 : 4 Unit dari 7 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional 2. Perawatan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran aktivitas SKPD pada Bulan Juni 3. Mengkomodir bahan bakar minyak dalam bentuk barang DPA Faktor Penghambat: Efisiensi pajak kendaraan yang dibayarkan di bawah harga DPA Faktor Pendukung: Kesadaran pegawai untuk memanfaatkan kendaraan dinas operasional sesuai peruntukannya
8.6.3	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.082.300	60,50	60,50	0,00	18.046.400	48,67		18.042.600	48,66	0,01		Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapawewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 3 Unit dari 3 Unit 2. Air Conditioner : 1 Jenis dari 1 Jenis 3. Peralatan Komputer : 1 Jenis dari 1 Jenis 4. LCD Proyektor : 1 Jenis dari 1 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin pada SKPD 2. Pemeliharaan Personal Computer (ganti hardisk, penambahan memori, update aplikasi, dan lain sebagainya) 3. Pemeliharaan laptop 4. Pemeliharaan Conditioner (di frozen, pemindahan posisi AC, dan penurunan AC yang sudah rusak) Faktor Penghambat: 1. Tahun ini tidak diizinkan pengadangan peralatan, padahal AC perlu penggantian yang baru 2. Gangguan tikus mengakibatkan AC kotor dan berbau Faktor Pendukung: 1. Keaktifan pegawai dalam melaporkan kerusakan sehingga dapat ditangani dengan cepat pula 2. Penanganan keluhan yang responsif
9	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	454.799.300	87,77	87,77	0,00	389.579.300	85,66		368.898.403	81,11	4,55				
9.1	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	189.099.900	83,62	83,62	0,00	150.350.500	79,51		132.277.750	69,95	9,56				
9.1.1	4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	147.100.000	98,50	98,50	0,00	137.550.600	93,51		119.998.050	81,58	11,93		BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum : 6 Dokumen dan 3 Dokumen 2. Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD penggantian antar waktu : 4 usulan SK dari 3 usulan SK 3. Pengusulan dan Pelantikan Pejabat Kepala Daerah (Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta) : 1 dokumen dan 1 dokumen 4. Laporan hasil Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 : 1 dokumen dan 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan penggantian antar waktu anggota DPRD : 1. Telah disahkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 7/KEP/2023 tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Sudr. Supratno R pada tanggal 6 Januari 2023. 2. Telah disahkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 13/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama saudara Kalis Gatot Raharjo pada tanggal 9 Januari 2023. 3. Telah disahkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 32/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Saudara Sukardiyono, S.H pada tanggal 31 Januari 2023. 4. Telah disahkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 70/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama saudara Sefi Indradewi, S.Pd pada tanggal 1 Maret 2023. 5. Koordinasi terkait PAW anggota DPRD DIY dari Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional. Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 : 1. Terlaksananya Rapat Persiapan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 2 Februari 2023 Pukul 09.30-selesai melalui daring. Acara ini dihadiri oleh KPU DIY, KPU Kota Yogyakarta, KPU Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Kulon Progo, KPU Bantul, KPU Gunungkidul, Bawasku Kota Yogyakarta, Bawasku Kabupaten Sleman, Bawasku Kabupaten Kulon Progo, Bawasku Kabupaten Gunungkidul, Panewu Godan, Panewu Lendah, Panewu Panggang, dan Panewu Sewon. Dalam hal ini membahas terkait pelaksanaan sosialisasi yang akan dilaksanakan 10 kali dengan rincian: 5 sosialisasi di Kota Yogyakarta dan 5 sosialisasi di Kabupaten. 2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten/Kota se-DIY pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 07.45 - selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gunungkidul, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Drs. Wahyu Kresandi, M.H Analisis Kebijakan Madya, dan Analisis Kebijakan Muda Otonomi Daerah dan KSDN di Biro Tata Pemerintahan. 3. Telah dilaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Kamis, 9 Februari 2023 pukul 09.00-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Pada sosialisasi kali ini dihadiri oleh dua narasumber yaitu Ketua Bawasku Kota Yogyakarta Bapak Tri Agus Inharto, S.H, serta Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Yogyakarta Ibu Siti Nurhayati, S.S. Acara sosialisasi dihadiri oleh peserta dari segmen persiapan yang diwakili Ibu-Ibu PKK se-Kemantren Gondokusuman dan Danurejan. 4. Telah dilaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Acara sosialisasi dihadiri oleh narasumber dari Ketua KPU Kota Yogyakarta Bapak Hidayat Widodo dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawasku Kota Yogyakarta Bapak Noor Harsya Aryosomodro S.Sn., MAP, serta Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Ibu Agustina Pangestika. Selain pada sosialisasi kali ini yaitu Tim Penggerak PKK Kemantren Kraton, Mergangsan, dan Mantriwiron sejumlah 40 orang. 5. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu, 15 Februari 2023 pukul 09.30 - selesai di Kantor Kapawewon Panggang, Gunungkidul. Acara sosialisasi kali ini dihadiri narasumber dari anggota komisi A DPRD DIY Bapak Herti Dwi Hartono, S.H; Ketua Divisi Permas dan SDM KPU Kabupaten Gunungkidul Ibu Supmi, S sos; Tri Asmyanto Ketua Bawasku Kabupaten Gunungkidul; Panewu Pangang Ibu Dra. Widayastuti, M.M, serta Ibu PKK se-kapawewon Panggang. 6. Terlaksananya Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan				Devisi	Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							
																	<p>2024 pada selasa, 21 Februari 2023 pukul 09.00 - selesai di Kantor Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Acara ini dihadiri oleh narasumber kita Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Ibu Ibaq Muhibah, SH, M, Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawasu Kabupaten Kulon Progo Bapak Wajiman M.H, dan Anggota Komisi A DPRD DIY Bapak Novida Kartika Hadji S.T. dengan dihadiri oleh seluruh PKK se-Kapanewon Lendah.</p> <p>7. Telah terlaksananya Sosialisasi Tahapan pemilu Tahun 2024 pada Jumat 3 Maret 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Acara ini dihadiri 40 peserta yang berasal dari TP-PKK se-Kemantren Tegayrejo, Jetis, dan Gedongtengen, narasumber kali ini berasal dari Ketua Komisi A DPRD DIY Bapak Eko Suwanto, Ketua KPU DIY Bapak Hamdan Kurniawan; dan Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawasu DIY Bapak Drs. Mohammad Najib, M.Si.</p> <p>8. Telah terlaksana Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Selasa 7 Maret 2023 pukul 09.00-selesai di Kantor Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang berasal dari TP PKK se-Kapanewon Godean dengan narasumber anggota Komisi A DPRD DIY Bapak Sudarto, S.H; Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SWH KPU DIY Bapak Almas Shalidi, S.Th.L, M.Hum; serta Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawasu DIY, Bapak Drs. Mohammad Najib, M.Si.</p> <p>9. Telah terlaksana Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada 9 Maret 2023 pukul 09.00-selesai di Kantor Kapanewon Dappok, Kabupaten Sleman dengan narasumber anggota Komisi A DPRD DIY bapak Heri Dwi Haryono, S.H; Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumberdaya Manusia, KPU Kabupaten Sleman bapak Aswino Wardhan; dan Ketua Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi, Bawasu Kabupaten Sleman Ibu Vici Herawati, S.P. Jumlah peserta dalam sosialisasi ini sebanyak 40 orang yang berasal dari TP PKK se-Kapanewon Dappok, Sleman.</p> <p>10. Telah terlaksana Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu 15 April 2023 pukul 09.00-selesai di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dengan narasumber anggota Komisi A DPRD DIY, KPH, Purbodiningrat, SE, MBA, Ketua KPU Kabupaten Bantul bapak Doko Nugroho, S.Ari; Ketua Bawasu DIY Ibu Sutrisnowati, SH, MH, M.Psi; Panewu Kapanewon Sewon Ibu Hartini, S.I.P, M.M, Acara ini dihadiri oleh 40 peserta yang berasal dari TP PKK se-Kapanewon Sewon Bantul.</p> <p>11. Telah terlaksana Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Jumat 17 April 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan. Acara ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang berasal dari TP PKK se-Kemantren Limbuharjo dan Kotagede, untuk narasumber kali ini berasal dari Ketua Komisi A DPRD DIY Bapak Eko Suwanto STM.Si; Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi DIY Bapak Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si; Ketua Bawasu Kabupaten Bantul Ibu Harini, S.H</p> <p>Pemilihan Serentak (Pilkada) :</p> <p>1. Telah terlaksana Rapat Koordinasi Potensi Permasalahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 pada Rabu, 5 April 2023 pukul 09.00-selesai melalui zoom meeting. Pada kesempatan rapat kali ini dihadiri oleh Kesbangpol DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Kesbangpol Kabupaten/Kota, Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota, dan Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam rapat kali ini membahas tentang permasalahan yang kerap muncul saat maupun menjelang Pilkada, yang perlu diantisipasi saat ini adalah netralitas ASN karena sangat rentan, sebagai contoh jika turut like dan share konten partai tertentu maka ASN yang bersangkutan dapat terkena sanksi.</p> <p>2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Ketugasan terkait Fasilitas Pemilihan Serentak (Pilkada) pada Senin, 10 April 2023 pada pukul 09.00 WIB sampai selesai di Ruang Rapat Bhakti Praja, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Lantai 3 Gedung Kresna. Pada rapat kali ini dihadiri oleh perwakilan BPKA, Bappeda DIY, Kesbangpol DIY, serta JF dan JFU Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi menyampaikan dalam menyiapkan surat usulan Bantuan Keuangan Khusus yang diajukan oleh Kabupaten/Kota akan memberikan bantuan keuangan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing Kabupaten/Kota.</p> <p>Pelaksanaan Pelantikan Pj Bupati - Walkota :</p> <p>1. Telah terlaksana Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Wali Kota Yogyakarta, pada Kamis, 4 Mei 2023 pukul 09.00 WIB-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Lantai III Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Rapat kali ini dihadiri oleh Pemerintah DIY meliputi: Bidang Layanan Teknologi Informasi Dinas Kominfo DIY; Satuan Pamong Praja DIY; Bagian Protokol Biro Umum, Humas, dan Protokol DIY; Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol DIY; Bagian Rumah Tangga Biro Umum, Humas, dan Protokol DIY; Biro Hukum Setda DIY; dan Bagian Pemerintahan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo; Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo; Bagian Rumah Tangga dan Protokol Setda Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi Dinas Komunikasi Informatika Kota Yogyakarta; Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta; dan Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta. Serta Ketua Tim Penggerak PKK DIY, PKK Kabupaten Kulon Progo; dan PKK Kota Yogyakarta. Dalam rapat ini membahas tentang pelaksanaan Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Wali Kota Yogyakarta serta Pelaksanaan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.</p> <p>2. Telah terlaksana Rapat Koordinasi Pelantikan Pj Ketua TP PKK Kabupaten/Kota pada Kamis, 11 Mei 2023 pukul 09.00 WIB-selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh Bagian Protokol Biro Umum, Humas, dan Protokol DIY; Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol DIY; Bagian Rumah Tangga Biro Umum, Humas, dan Protokol DIY; Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Setda DIY; Biro Tata Pemerintahan Setda DIY; Bagian Rumah Tangga dan Protokol Setda Kabupaten Kulon Progo; Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta; Ketua Tim Penggerak PKK DIY, Pj Ketua TP PKK Kabupaten Kulon Progo; dan Pj Ketua TP PKK Kota Yogyakarta. Pada rapat ini dibahas tentang teknis dan waktu pelaksanaan pelantikan.</p> <p>3. Telah terlaksana Gladi Bersih Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Wali Kota Yogyakarta sekaligus Gladi Bersih Pelantikan Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten/Kota pada Minggu, 21 Mei 2023 pukul 13.00-selesai di Bangsal Kepatihan dan Gedung Praemasano. Diikuti oleh Bagian Protokol Biro Umum, Humas, dan Protokol DIY; Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol DIY; Bagian Rumah Tangga Biro Umum, Humas, dan Protokol DIY; Biro Hukum Setda DIY; dan Bagian Pemerintahan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo; Bagian Rumah Tangga dan Protokol Setda Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta; dan Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta. Serta Ketua Tim Penggerak PKK DIY, PKK Kabupaten Kulon Progo; dan PKK Kota Yogyakarta. Serta Penjabat Bupati/Wali Kota dan Calon Penjabat Bupati/Walkota.</p> <p>4. Telah Terlaksana Pemberhentian dan Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Wali Kota Yogyakarta oleh Bapak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 12.00-selesai di Bangsal Kepatihan yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Memutuskan penempatan pemberhentian Sumadi, S.H, M.H sebagai Wali Kota Yogyakarta sehingga kembali sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Sekretariat Daerah DIY, kemudian mengangkat Saudara Singgih Rahaerjo, SH, M.Ed sebagai Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Memutuskan dan menetapkan pemberhentian Drs. Tri Saliyana, M.Si sebagai Bupati Kulon Progo sehingga kembali sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY, kemudian mengangkat Saudari Ni Made Dwiapri Indriyanti, S.T, M.T sebagai Penjabat Bupati Kulon Progo yang sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>5. Telah dilaksanakan pelantikan Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Kulon Progo dan TP PKK Kota Yogyakarta oleh Wakil Ketua I TP PKK DIY GKBRAy Paku Alam pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 15.00-selesai di Gedung Praemasano. Dalam hal ini Saudari Arianita Suprapti dilantik sebagai Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Kulon Progo menggantikan Saudari Priyentini, serta Saudari Akh Wulandari selaku istri Penjabat (Pj) Walkota Yogyakarta dilantik menggantikan Saudari Surti Fatmah.</p> <p>Faktor Pendorong:</p> <p>1. Efisiensi dari Penyelenggaraan Sosialisasi sebesar</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Realisasi (%)	Devisi	Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)								
																		Rp.2.000.000 karena narasumber yang tidak hadir 2 OJ (Rp.2.000.000). 2. Efisiensi dari penyelenggaraan pelantikan sebesar Rp.12.297.450 yang terdiri dari: a. Efisiensi anggaran backdrop Pelantikan PJ Bupati dan Wali Kota dan Pelantikan PJ TP PKK Kabupaten/Kota Rp.7.000.000, (karena harga pasar lebih tinggi dari anggaran DPA sehingga difasilitasi oleh Biro UHF). b. Efisiensi Honor Rohaniwan Rp.400.000 (hanya Agama Islam saja). c. efisiensi anggaran Pakelan Dinas Upacara Rp.4.575.450 (Harga dibawah DPA). d. Efisiensi anggaran bumbung SK Rp.142.000 (harga pasar dibawah harga DPA). e. Efisiensi Cetak (materai) Rp.180.000 (karena narasumber 2 OJ tidak hadir). 3. Efisiensi anggaran ATK sebesar Rp.39.700 (Harga pasar dibawah harga DPA). 4. Pelaksanaan Rakor Penetapan Fasilitas Pilkada yang sedianya akan dilaksanakan TW II mundur dari jadwal yang telah direncanakan karena Arahan Kemendagri terkait Desk Pilkada baru diterbitkan di bulan Juni 2023 dan arahan pimpinan/ Bapak Sekda terkait penanggungjawab Desk Pilkada di Biro Tapem dipertahankan pada 12 Juni 2023. 5. Efisiensi peradilan dalam daerah Rp100.000 (1 OH tidak dapat mengikuti peradilan). 1. Koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik dengan pembab/kota dan stakeholder terkait. 2. Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana kantor.
9.1.2	4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	41.999.900	31,50	31,50	0,00	12.799.900	30,48	12.279.700	29,24	1,24				BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum		1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan penyelesaian pembangunan di wilayah perbatasan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Tersusunnya jadwal rencana pelaksanaan kegiatan B. Terlaksananya rapat koordinasi internal dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan C. Terlaksananya rapat koordinasi finalisasi Rapergub Pengkoordinasian pembangunan wilayah perbatasan D. Terlaksananya rapat koordinasi terkait pembahasan penyusunan Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan DIY Tahun 2023 E. Tersusunnya surat permohonan personil Tim Pembangunan wilayah perbatasan DIY Tahun 2023 F. Terlaksananya koordinasi dan persiapan penyelenggaraan pembangunan wilayah perbatasan di Kab. Sleman dan Kab. Gunungkidul G. Terlaksananya Rakor Penyerahan Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY Faktor Penghambat: - Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: A. Kerjasama yang solid dan koordinasi yang baik antara personil
9.2	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	75.000.000	80,86	80,86	0,00	58.995.900	78,66	56.829.900	75,77	2,89							
9.2.1	4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	75.000.000	80,86	80,86	0,00	58.995.900	78,66	56.829.900	75,77	2,89							1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan : 2 Laporan dari 2 Laporan Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2022 1. Koordinasi dengan Tim Penerapan SPM DIY Tahun 2022 2. Pengumpulan data laporan penerapan SPM DIY Tahun 2022 3. Entri data laporan SPM 4. Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2022 5. Verifikasi data laporan penerapan SPM DIY Tahun 2022 6. Sinkronisasi data SPM 2022 dengan data LPPD 2022 Movev dan Pelaporan SPM DIY Tahun 2023 7. Monitoring input pelaporan SPM TW 1 Tahun 2023 8. Evaluasi Bertanggungjawab APBD Kab Sleman Tahun 2022 Terkait dengan SPM 9. Penyusunan dan Pembahasan Draft Rapergub SPM DIY Pengganti Pergub 111/2020 10. Penyampaian Draft Rapergub SPM Pengganti Pergub 111/2020 ke Biro Hukum 11. Monitoring input pelaporan SPM TW 11 Tahun 2023 Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Tanggapan Pemohonan Informasi (Keterbukaan Informasi Publik) LPPD DIY Tahun 2017 - 2022 2. Rakor Pengalihan Aset jalan dari Kementerian PU/R RI kepada Pemda DIY dan dari Pemda DIY kepada Kemen PU/R RI Faktor Penghambat: LPPD: 1. Terdapat capaian-capaian yang belum optimal dikarenakan IKK LPPD belum menjadi target kinerja OPD yang disupport dengan anggaran 2. Perbedaan persepsi terkait definisi IKK 3. Terdapat efisiensi add cost perjalanan dinas narasumber. SPM: 1. Data yang dihasilkan pada Pendataan SPM berdasarkan Permendagri 59/2021 belum lengkap 2. SPM Perubahan Rakyat (Penyediaan RLH) belum didukung dengan penganggaran program/kegiatan untuk pemenuhannya 3. Target SPM PU oleh OPD berdasarkan kapasitas bukan berdasarkan jumlah penerima layanan 4. Perlu adanya pendataan SPM (Update) per Tahun 2022 Faktor Pendukung: LPPD: 1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk Pelaporan Pemda DIY Tahun 2022 sinkron baik di LPPD, LKIP, LAKIP, LKIP dan SPM 2. Penyamaan persepsi dengan Pemerintah Pusat dan pihak terkait (Inspektoral maupun OPD) terkait definisi IKK terutama pada saat evaluasi SPM: 1. Adanya pelaporan triwulanan pada aplikasi eSPM 2. Pelaporan SPM Tahun 2022 telah menggunakan format sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 3. Disediakan Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk mendukung pemenuhan SPM
9.3	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	190.699.400	94,60	94,60	0,00	180.232.900	94,51	179.790.753	94,28	0,23							
9.3.1	4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	190.699.400	94,60	94,60	0,00	180.232.900	94,51	179.790.753	94,28	0,23							1. Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi : 2 Dokumen dari 2 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri : - Selasa, 6-6-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Pertamina dengan Pemda DIY - Jumat, 9-6-2023, Rapat koordinasi jejaring penganggaran - Selasa, 13-6-2023, Konfirmasi penawaran kerja sama TPA Piyungan - Senin, 26-6-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Kementerian Perdagangan dengan Pemda DIY - Selasa, 27-6-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Kementerian Desa dan Transmigrasi dengan Pemda DIY Faktor Penghambat: susahnyanya mendatangkan tim TKSD di rapat off line karena sering berbentangan dengan agenda lain Faktor Pendukung: penggunaan rapat on line sangat membantu bagi tim TKSD yang sedang sibuk, karena bisa sambil melakukan kesibukan yang lain
10	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	3.193.542.350	38,32	38,32	0,00	574.781.150	18,00	444.727.745	13,93	4,07							
10.1	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	2.874.183.550	42,58	42,58	0,00	574.781.150	20,00	444.727.745	15,47	4,53							
10.1.1	4.01.10.5.01.10	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	2.874.183.550	42,58	42,58	0,00	574.781.150	20,00	444.727.745	15,47	4,53				BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina : Dokumen dari 8 Dokumen		1. Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina : Dokumen dari 8 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina : Dokumen dari 8 Dokumen - Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
															<p>Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Laporan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan : Aplikasi dari 1 Aplikasi</p> <p>5. Sosialisasi Kelembagaan Asli Daerah : 40 Kali dari 60 Kali</p> <p>6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kalurahan : Aparatur dari 98 Aparatur</p> <p>7. Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan : Kali dari 4 Kali</p> <p>8. Kajian Pedoman Pengembangan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>9. Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada 392 Kalurahan (390 Kalurahan sudah mengisi co reform space) : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Kelembagaan Kapanewon / Kemantren melalui koordinasi internal menetapkan bahan materi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait :</p> <p>- Terlaksananya Koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan kelembagaan kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan melalui koordinasi lapangan ke Kabupaten Bantul dengan lokasi Kalurahan Guwasari. Kemudian koordinasi dalam upaya penguatan peran pemerintah kalurahan dilakukan melalui forum rapat kerja penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dengan sasaran pembahasan 8 area perubahan pada penerapan reformasi birokrasi kalurahan sebagai berikut:</p> <p>a. Tanggal 24 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area manajemen perubahan dan peraturan perundangan</p> <p>b. Tanggal 25 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area penguatan organisasi, tata laksana dan penguatan pengawasan</p> <p>c. Tanggal 26 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area perubahan Penguatan SDM</p> <p>d. Tanggal 20 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area perubahan Penguatan Akuntabilitas</p> <p>e. Tanggal 31 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area perubahan Penguatan Pelayanan Publik Quick Wins dan Lembar Kerja Evaluasi</p> <p>-Penguatan terhadap kebijakan reformasi birokrasi kalurahan melalui Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebanyak 4 kali melibatkan OPD Pemda Kabupaten, Paguyuban Lurah dan Pamong serta kapanewon dengan rundown:</p> <p>a. Tanggal 21 Februari di Kabupaten Bantul</p> <p>b. Tanggal 22 Februari di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>c. Tanggal 23 Februari di Kabupaten Kulon Progo</p> <p>d. Tanggal 27 Februari di Kabupaten Sleman</p> <p>- Koordinasi bersama Akademisi untuk menelaah draft pergub Reformasi Birokrasi Kalurahan pada tanggal 15 Maret untuk mendiskusikan juknis RBK.</p> <p>-Pelaksanaan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren</p> <p>a. Tanggal 26 Maret di Kalurahan Gedongkwo, Kemantren Mantijenor, Kota Yogyakarta</p> <p>b. Tanggal 29 Maret di Kalurahan Guwasari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul</p> <p>c. Tanggal 31 Maret di Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo,Kabupaten Bantul</p> <p>d. Tanggal 19 Mei Pelaksanaan Forum Komunikasi melibatkan SDM Nelayatika dan OPD Pemda DIY</p> <p>2) Sosialisasi Kelembagaan Asli DIY</p> <p>- Koordinasi penguatan materi dan penyusunan kerangka acuan kerja rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi kelembagaan asli DIY dengan hasil pelaksanaan di bulan Februari sebanyak 10 kali melibatkan aparat pemerintah kalurahan di Kabupaten Sleman</p> <p>-Terlaksananya sosialisasi kelembagaan asli Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan Lurah/Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan serta Ketua Dukuh, dengan rundown sebagai berikut:</p> <p>a. Tanggal 21-24 Februari dengan lokasi peserta dari Kalurahan se-Kabupaten Sleman</p> <p>b. Tanggal 27 Februari dengan lokasi peserta dari Kabupaten Bantul</p> <p>c. Tanggal 8,9,15,16 dan 17 Maret dengan lokasi peserta dari Kabupaten Gunungkidul</p> <p>d. Tanggal 8, 9, 15, 16, dan 17 Maret 2023 dengan lokasi peserta dari Kabupaten Gunungkidul</p> <p>e. Tanggal 11,15,16,17 dan 19 Mei 2023 dengan lokasi peserta dari Kabupaten Kulon Progo</p> <p>f. Tanggal 15,16,22,23 dan 26 Juni 2023 dengan lokasi peserta dari Kaota Yogyakarta</p> <p>3) Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan</p> <p>- Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi untuk membahas KAK dan Focus Group Discussion Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan dengan konteks Kajian Peta jalan / roadmap Sistem Informasi Kalurahan sejak tanggal 15 Juni 2023.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Dalam pelaksanaan sosialisasi kelembagaan asli DIY sebagai kegiatan usulan legislatif terdapat tiga kali pelaksanaan tanpa kehadiran narasumber dari DPRD DIY sehingga adanya pengembalian</p> <p>- Februari honorarium narasumber @1.000.000 x 3</p> <p>- Maret honorarium narasumber @1.000.000 x 4</p> <p>- Juni: honorarium narasumber : @1.000.000 x 2 uang transport peserta: 60.000x 23</p> <p>2. Efisiensi Zoom, sebesar 1.449.949</p> <p>3. Adanya redesign kegiatan Dais perubahan tahap 1</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Kehadiran peserta dari unsur Perwakilan Kota Yogyakarta</p> <p>2. Kesiapan narasumber untuk memberikan materi</p>
10.2	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Kelestimewaan	319.358.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00						
10.2.1	4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksanaan Urusan Kelembagaan	319.358.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00					<p>1. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksanaan Urusan Kelestimewaan yang Disediakan : Unit dari 14 Unit</p> <p>2. Rehab Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY : Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Air Conditioner : Unit dari 6 Unit</p> <p>4. Printer : Unit dari 2 Unit</p> <p>5. Televisi : Unit dari 1 Unit</p> <p>6. Personal Komputer : Unit dari 2 Unit</p> <p>7. Laptop : Unit dari 1 Unit</p> <p>8. LCD Proyektor : Unit dari 1 Unit</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	
Jumlah			5.406.383.650	43,72	43,72		1.688.950.950	31,24	1.506.420.158	27,86						